

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Masyarakat Yang Terdampak Abrasi Air Laut Di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Jiswy Carmenita Kauntul¹

Novie R. Pioh²

Fanley N. Pangemanan³

Email Korespondensi: jiswykauntul083@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Wilayah pantai merupakan bagian dari permukaan bumi yang selalu mengalami perubahan sebagai akibat proses geomorfologi seperti tenaga yang berasal dari luar bumi (eksogen) maupun tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri (endogen). Tenaga geomorfologi yang dimaksud yaitu semua proses alami yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi seperti tanah, arus, tsunami, abrasi, dan angin. Proses alamiah ini berlangsung sangat lambat tanpa disadari oleh manusia sehingga hasil atau akibatnya baru terlihat setelah bertahun-tahun lamanya. Abrasi di di pantai amurang pada tahun 2022 merupakan sebuah bencana di wilayah pantai, dan hal tersebut membutuhkan peran dari Badan penanggulangan bencana daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana dalam penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut di Pantai Amurang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Peran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum maksimal, karena masyarakat merasa bahwa BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penanganan korban bencana abrasi air laut hanya bersifat sementara, apa yang diperlukan masyarakat korban abrasi air laut sudah tidak di perhatikan lagi, tidak adanya program dari BPBD untuk pelatiha kepada masyarakat tentang mitigas bencana, padahal itu merupakan program untuk meningkatkan SDM khususnya pada masyarakat.

Kata Kunci: Peran, BPBD, Abrasi, Pantai

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Bencana alam yang terjadi di pesisir Pantai Amurang, Kel. Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Pernah juga terjadi pada tahun 1968. Menurut Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu Widodo S Pranowo, menjelaskan awal penyebab abrasi Pantai Amurang karena sejumlah faktor. Salah satunya kondisi geografis Pantai Boulevard, Amurang, yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi. Hal ini membuat teluk sehingga bisa menyebabkan refraksi gelombang laut ketika memasuki teluk. Refraksi adalah Bergeraknya gelombang menuju pantai yang kemudian mengalami proses perubahan garis puncak gelombang. Kemudian gelombang tersebut berusaha bergerak sejajar dengan kontur garis pantai. Faktor lainnya diduga karena pembangkit hidrodinamika arus penggerus Pantai Boulevard. ada dua gaya pembangkit arus yang datangnya dari arah berlawanan di depan mulut Teluk Amurang, yang kemudian masuk ke Teluk Amurang.

Arus akibat gaya pasang surut bergerak menuju ke arah timur-laut, sedangkan arus akibat angin dan gelombang laut bergerak menuju barat. Kedua arus tersebut kemudian bergerak masuk ke Teluk Amurang menciptakan energi yang dahsyat menggerus pantai di dalam Teluk Amurang. Kemudian jika ditinjau dari data pasang surut pada 15 Juni 2022 antara pukul 13:00 hingga 17:00 waktu setempat, elevasi muka laut di Stasiun Labuhan Uki terlihat lebih tinggi dari pada di Stasiun Manado.

Kerusakan akibat Abrasi Pantai di Amurang Minsel Cukup Parah Secara teori, air mengalir dari elevasi lebih tinggi menuju ke yang rendah. Artinya akan terjadi aliran massa air yang bergerak ke timur laut, yakni dari arah Stasiun Labuhan Uki menuju ke Stasiun Manado. Aliran massa air tersebut akan memiliki peluang yang sangat besar masuk ke Teluk Amurang. Sebab posisi Teluk Amurang berada di antara Labuhan Uki dan Manado Apabila ditinjau dari data angin dan data gelombang, pada 15 Juni 2022 antara pukul 12.00 hingga 14.00 waktu setempat, angin di depan mulut Teluk

Amurang bergerak menuju ke arah Barat. Adapun kecepatannya antara 9 hingga 13 knot dan diperkirakan menghasilkan gelombang setinggi 0,6 hingga 0,8 meter. Angin dan gelombang ini, membangkitkan arus yang bergerak masuk ke Teluk Amurang menambah kekuatan arus yang dibangkitkan gaya pasang surut yang juga masuk ke Teluk Amurang.

Pada saat terjadi abrasi air laut di Pantai Amurang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14:00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai dari Rabu 15 Juni 2022 hingga Selasa 28 Juni 2022. Pada saat terjadinya abrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, serta harta benda dari korban abrasi air laut di Pantai Amurang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membuka 3 pos komando yaitu posko pengungsian di Aula Gereja GMIM Sentrum Amurang dan Aula Kantor Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang dan posko logistik atau bantuan di Kantor Kelurahan Lewet.

Langkah-langkah penanganan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan:

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, Badan penanggulangan Bencana Daerah melakukan data jumlah korban, dan kerusakan sarana prasarana akibat abrasi air laut.
- Penetapan status keadaan darurat bencana, dalam hal ini status keadaan darurat bencana ditetapkan agar memberikan kemudahan untuk pengerahan sumber daya manusia, pengerahan logistik pengelolaan dan pertanggungjawaban uang atau barang.
- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak abrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penyelamatan dan pemindahan korban abrasi dengan memberikan

pelayanan kemanusiaan seperti pencarian dan penyelamatan korban yang terkena abrasi air laut.

- d. Pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah seperti bantuan tempat penampungan bagi korban abrasi air laut, bantuan makanan, pakaian, air bersih dan sanitasi dan bantuan pelayanan kesehatan bagi korban abrasi air laut.
- e. Pasca Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membangun sebanyak 120 unit hunian sementara pasca bencana abrasi Pantai Amurang.

Dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan Badan Penanggulangan Bencana belum berupaya mengurangi laju abrasi, dan tidak ada Peta Rawan Bencana untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau akan di perkirakan akan mengalami bencana padahal dampak yang diakibatkan sangat besar bagi keselamatan warga yang tinggal di pesisir Pantai Amurang

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Masyarakat Yang Terdampak Abrasi Air Laut Di Pantai Amurang, dan bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana dalam menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana untuk Desa atau Kelurahan yang rawan bencana. Penulis menggunakan teori Peran dari Siagian S. P (2009;142) yang meliputi 5 indikator

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang di gunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Mikes dan Hubberman (Sugiyono) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Peran sebagai stabilisator

Pada indikator ini peneliti akan membahas mengenai Peran sebagai stabilisator dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut di Pantai Amurang kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Peran BPBD kabupaten Minahasa Selatan sebagai stabilisator harus selalu menjaga masyarakat yang ada di Minahasa Selatan agar aman dalam keadaan keseharian mereka dan membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang terkena abrasi Pantai Amurang .

BPBD kabupaten Minahasa Selatan selaku organisasi pemerintah memiliki tugas memberikan rasa aman terhadap bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba, untuk memberikan rasa aman tersebut kebijakan yang dilakukan BPBD adalah peningkatan kapasitas berbasis masyarakat. Peningkatan kapasitas berbasis masyarakat yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bencana. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat yang ada pesisir pantai dan memberikan peringatan dini jika terjadinya gelombang laut peringatan dini bertujuan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana seperti abrasi.

Pada indikator ini peneliti melihat bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku stabilisator belum maksimal dalam pencegahan bencana yang ada di Minahasa Selatan, seharusnya badan penanggulangan bencana khususnya Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan menyiapkan peta rawan bencana untuk masyarakat, dan selalu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan bencana, mitigasi ,serta pengurangan resiko bencana agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, dan dalam penanganan pada saat terjadinya abrasi air laut di Pantai Amurang Peran Badan

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, penanganan yang dirasakan oleh masyarakat hanya sementara, sesuai dengan wawancara dengan masyarakat, masyarakat menilai bahwa penanganan yang di berikan badan penanggulangan bencana hanya pada saat di pengungsian, pada saat masyarakat pindah di hunian sementara tidak ada lagi bantuan dari badan penanggulangan bencana yang masyarakat dapatkan, mulai dari bahan pokok makan, listrik dan air. Jadi masyarakat merasa sudah tidak ada bantuan dan perhatian yang mereka rasakan dari badan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang tinggal di hunian sementara.

2. Peran Sebagai Inovator

Peran sebagai Inovator yaitu Peran organisasi pemerintah menciptakan ide baru menjadi sebuah kebijakan atau menciptakan sebuah mekanisme baru untuk efektifitas dan efisiensi waktu, tetapi inovasi juga bisa berarti membangun dan memperbaiki yang sudah ada. Salah aspek yang membutuhkan inovasi yaitu standar operasional prosedur dimana selalu membutuhkan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Standar operasional prosedur merupakan suatu mekanisme Kerjasama terstruktur memuat Langkah-langkah yang akan diambil ketika terjadi bencana, mekanisme tersebut disusun dan disepakati bersama oleh semua insitisi pelaksana dan mengatur tugas, kewenangan, koordinasi antar insititisi tersebut. Dalam penangulangan bencana yang membutuhkan waktu yang singkat seperti bencana abrasi air laut, inovasi sangat diperlukan terutama inovasi sistem operasional kerja untuk mempersingkat jalur koordinasi dan mempercepat penanganan agar dampak bencana yang ditimbulkan ke masyarakat dapat diminimalisir.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan inovasi metode kerja dan program di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang belum optimal, yaitu belum ada program selanjutnya untuk pembuatan peta rawan bencana bagi masyarakat minahasa selatan karena terbatasnya anggaran dan Sumber

Daya Manusia dalam pembuatan dan pemutahiran peta rawan bencana. Sedangkan dalam Tugas dan Fungsi Bidang pencegahan dan harus memiliki inovasi yaitu program berupa peta rawan bencana, sosialisasi tentang edukasi bencana, pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan bencana dan penanganan pada saat masyarakat, agar dapat meningkatkan sumber daya manusia.

Dan Peneliti melihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam metode kerja masih pasif dan hanya mengandalkan kebijakan BNPB, BPBD provinsi sulawei Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan masih kurang dalam meningkatkan SDM pegawai dari BPBD Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Peran Sebagai Modernisator

Sebagai organisasi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu bertransformasi dengan kebutuhan masyarakat baik melalui transformasi struktur organisasi, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan kebencanaan, maupun perubahan paradigma di masyarakat tentang penanggulangan bencana abrasi air laut. Perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya menitik beratkan pada penanganan respons bencana bertransformasi menjadi kesiapsiagaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyadari peningkatan kapasitas pegawai sangat di perlukan terutama saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas pegawainya Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, POLRI dan TNI. Kerjasama dengan instansi-instansi tersebut dikarenakan kompetensi yang belum memadai dari Badan penanggulangan Bencana sendiri sehingga membutuhkan Kerjasama dengan instansi lain yang telah memiliki kompetensi. Dan Peneliti melihat masih kurangnya alat-alat yang sediakan oleh BPBD pada saat terjadinya BPBD sehingga masih memninta bantuan kepada instansi yang ada, dan belum tersedianya peta rawan

bencana, padahal itu sangat penting masyarakat sesuai perkembangan zaman sekarang ini.

Peran BPBD sebagai modernisator tidak hanya dilakukan pada anggota BPBD saja namun kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai sasaran utama dari setiap kegiatan BPBD itu sendiri, selain itu peningkatan pengetahuan kebencanaan di masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana seperti abrasi air lau. Dengan meningkatnya pemahaman di masyarakat maka masyarakat dapat melihat isu-isu yang ada sebelum bencana terjadi kemudian dapat mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang telah didapat sebelumnya. kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan di yang telah intensif dilakukan beberapa tahun belakangan oleh BPBD, tapi untuk pelatihan kepada masyarakat masih kurang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih kurang pemahaman tanggap darurat pada saat terjadinya abrasi.

4. Peran Sebagai Pelopor

Sebagai organisasi pemerintah yang di bentuk untuk menanggulangi bencana baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana menjadikan BPBD Kabupaten Minahasa Selatan harus dapat mengambil tindakan dan upaya yang maksimal tidak hanya ketika bencana tetapi juga meminimalisir terjadinya bencana. Penanggulangan bencana abrasi merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang, Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar stake holder tersebut BPBD berPeran sebagai pelopor dan fasilitator yang aktif mengsucceskan program-program penanggulangan bencana di kabupaten minahasa selatan dan termasuk upaya pencegahan abrasi, evakuasi dan perlindungan pengungsi, upaya rekonstruksi pasca bencana.

BPBD Kabupaten Minahasa Selatan bertindak sebagai pelopor dalam penanggulangan bencana, hal ini didukung pula dengan naiknya status BPBD menjadi

badan yang setingkat dengan dinas untuk mempermudah koordinasi antar badan. Langkah-langkah yang dilakukan BPBD Kabupaten Minahasa Selatan sebagai kepeloporan dalam penanggulangan bencana abrasi yaitu penyusunan kajian resiko bencana, kajian resiko benca dibuat bersama-sama dengan semua Stakeholder terkait dengan memadukan data lembaga masing-masing. Dalam kajian resiko bencana tersebut memuat kondisi geografi, demografis, indeks resiko bencana dan memperjelas secara mendetail Peran masing-masing stakeholder dalam penanggulanganbencana abrasi di Kabupaten Minahasa Selatan.

BPBD memiliki keseriusan sebagai pelopor dalam menghadapi bencana abrasi dimana BPBD berusaha menjadi Lembaga pemerintah pertama yang tiba pada saat terjadi bencana. Meskipun demikian pada saat waktu yang krusial seperti pada saat tanggap darurat tidak dapat di pungkiri BPBD membutuhkan Lembaga lain seperti dinas Kesehatan dan TNI-POLRI untuk mengevakuasi masyarakat dan meminimalisir korban. BPBD melalui bidang III rekonstruksi dan rehabilitasi telah menjalankan program pembangunan yaitu pembangunan hunian sementara dan sekarang sedang pembangunan hunian tetap dan rencananya fasilitas umum yang pernah ada akan di bangun kembali. Dari hal tersebut maka dapat dapat disimpulkan BPBD telah melaksanakan Perannya sebagai pelopor dalam penanggulangan abrasi.

5. Peran Sebagai Pelaksana Sendiri

Kegiatan penanganan masyarakat yang terdampak abrasi air laut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bukan semata-mata menjadi beban pemerintah. Berbagai penyebab penanggulangan bencana hanya dilakukan oleh BPBD yaitu keselamatan masyarakat, sarana prasarana yang terbatas, kompetensi yang belum memadai dan Sarana prasana yang dipergunakan BPBD saat ini dalam penangan bencana abrasi merupakan sarana prasarana yang didapat melalui BNPB, BPBD provinsi Sulawesi Utara dan instansi lainnya. sarana prasarana untuk BPBD sendiri telah lengkap namun belum mencukupi dari segi

kuantitas untuk dipergunakan dalam penanganan bencana abrasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti mengetahui bahwa alat-alat yang ada masih bertipe standar untuk melakukan penanganan pada saat terjadinya abrasi. Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Minahasa Selatan saat ini digunakan dalam penanganan abrasi, namun dari segi kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana tersebut belum mencukupi. Hal tersebut dikarenakan ketika saat tanggap darurat BPBD harus meminta bantuan sarana prasarana tambahan kepada BASARNAS, PUPR, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, TNI, POLRI untuk mengevakuasi korban dan mendirikan pengungsian. Jika dilihat dari segi kualitas BPBD memiliki sarana dalam kondisi baik tetapi bertipe standar sehingga ketika terjadi bencana abrasi di butuhkan sarana yang lebih spesifik tetapi kuantitasnya masih kurang.

Dan untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia BPBD melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya, tentunya sumber daya manusia bantuan dari lembaga lain tidak dapat selalu siap membantu saat bencana. Kebutuhan akan sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang harus ditemukan solusinya karena bencana abrasi merupakan bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba untuk itu dengan rekrutmen sumber daya manusia maka sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan BPBD dalam penanganan abrasi. Faktor lain yang mempengaruhi BPBD dalam penanganan bencana abrasi selain sarana prasarana adalah anggaran. Anggaran bagi organisasi pemerintah seperti BPBD merupakan unsur yang sangat penting. Pentingnya anggaran bagi penanganan abrasi karena beberapa alasan yaitu anggaran menjadi alat BPBD untuk melakukan pembangunan fasilitas penanganan abrasi dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat seperti pengadaan alat-alat untuk membantu pada saat evakuasi dan untuk pembuatan peta rawan bencana bagi masyarakat. Selain itu anggaran juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam Perannya sebagai pelaksana sendiri, karena

dari hasil wawancara dengan masyarakat, Masyarakat merasa bahwa BPBD hanya memperhatikan masyarakat korban abrasi air laut pada saat di pengungsian, dan pada saat mereka sudah pindah di hunian sementara BPBD tidak memperhatikan lagi bagi masyarakat yang tinggal di hunian sementara, sedangkan masyarakat masih sangat memerlukan bantuan dari BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dan masyarakat ingin mengetahui kejelasan dari semua dana yang masuk dan keluar pada saat terjadinya abrasi air laut.

Penutup Kesimpulan

Stabilisator, peneliti melihat Peran BPBD Kabupaten Mianahsa Selatan belum maksimal, karena masyarakat merasa bahwa BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penanganan korban bencana abrasi air laut hanya bersifat sementara, apa yang diperlukan masyarakat korban abrasi air laut sudah tidak di perhatikan lagi, tidak adanya program dari BPBD untuk pelatiha kepada masyarakat tentang mitigas bencana, padahal itu merupakan program untuk meningkatkan SDM khususnya pada masyarakat.

Inovator, belum adanya inovasi yang berasal dari internal BPBD dalam hal ini belum tersedianya Peta rawan bencana yang di sediakan BPBD bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, dengan alasan peta rawan bencana harus di update tiap tahun, terbatasnya anggaran dan kurangnya SDM dari BPBD untuk pengupdatean setiap tahunnya, sehingga membuat masyarakat masih kurang untuk mengetahui informasi tentang daerah rawan bencana.

Modernisator, Peran BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan pada saat terjadinya abrasi dinilai sudah cukup baik, mulai dari cepatnya mengevakuasi korban, Pendirian 2 posko yaitu posko pengungsian dan posko bantuan, dan mendapatkan fasilitas yang layak. Namun peneliti menilai untuk alat-alat evakuasi masih harus di tambah untuk memaksimalkan penanganan pada saat tanggap darurat

Pelopor, dalam Perannya sebagai pelopor sudah baik namun masih harus

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dibutuhkannya pertemuan-pertemuan agar koordinasi semakin terbina dengan baik. Ini disebabkan oleh pentingnya koordinasi antara dinas-dinas tersebut dengan BPBD Minahasa Selatan agar terjalin kerjasama yang baik pada saat penanganan

Peran sebagai pelaksana sendiri, sebagai organisasi pemerintah dalam Perannya sebagai pelaksana sendiri BPBD harus terdepan dalam penanganan abrasi air laut. Namun dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di BPBD dan terbatasnya alat-alat dari BPBD dan keterbatasan anggaran BPBD maka tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan bencana juga terbatas, dan membuat masyarakat merasa tidak puas dengan penanganan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

Diharapkan kepada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan lebih meningkatkan kualitas sumber daya dari BPBD dan meningkatkan kualitas dengan mengikuti atau mengadakan pelatihan mengenai penanganan bencana agar ketika terjadi bencana pelaksanaan penanganan dapat lebih maksimal.

BPBD Kabupaten Minahasa Selatan di harapkan segera membuat atau mengupdate kembali peta rawan bencana agar masyarakat yang ada di Minahasa Selatan Mengetahui daerah yang rawan akan bencana, dan dapat membuat pendidikan kebencanaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang terampil dalam mengatasi permasalahan kebencanaan, serta menghindari permasalahan kebencanaan.

Diharapkan BPBD Kabupaten Minahasa Selatan untuk lebih meambah sarana dan prasarana yang agar dapat membantu kegiatan penanganan bencana untuk menjadi lebih efektif.

Diharapkan BPBD Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengadakan sosialisasi yang rutin dan merata kepada setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan mengenai pengurangan resiko korban bencana, agar masyarakat lebih banyak tau tentang apa yang di lakukan

ketika terjadi bencana, dan lebih meningkatkan program untuk pencegahan bencana yang akan terjadi.

Dan diharapkan kepada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan untuk lebih memperhatikan keluhan dari para korban abrasi air laut yang tinggal di hunian sementara, mengenai masalah air dan listrik agar masyarakat terkena abrasi air laut yang ada di hunian sementara lebih merasakan perhatian dan bantuan dari BPBD kabupaten Minahasa Selatan .

Daftar Pustaka

- Adrianto, (2011). Pengantar penilaian ekonomi sumberdaya pesisir dan laut., Bangun, w. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: erlangga. Bogor PKSPL-IPB.2wsx. Cipta.
- Creswel, J. W. (2010). Edisi ke-3. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta.
- Dessler, G. (2015). ` Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat I-2.
- Iqbal. (2004). Analisis data penelitian dengan statistic, Jakarta: PT Bumi Aksara . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kanisius, 2010 Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABATA
- Lasabuda, Ridwan. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Moleong, Loxy J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif “ Edisi Revisi” Bandung: Muhadjir, Noeng. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta :
- Nazir. (2011). Metode Penelitian. Ghaloa Indonesia. Pengelolaannya. Oseana. Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax: Vol.
- Pohan, Rusdi. (2007). Metode Penelitian, Aceh : Ar-Rigal Institut.
- Pramudji. (2000). Hutan Mangrove di Indonesia: Peran Permasalahan dan
- Raho, B. (2007) . Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustakarya.
- Rakesarasin.
- Ramani. (2000). Geomorfologi Umum.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
Padang, FIS UNP.

ISSN: 2337 - 5736

Remaja Rosdakarya.

Subadi, Tjipto. (2006). Metode Penelitian Kualitatif, surakarta : Muhammadiyah

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta : PT. Gramedia.

Suhardono, Edy. (1994). Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)

Suharmi Arikunto, Suharmi. (1993) Manajemen Penelitian, Jakarta: Rhineka Cipta

Suharsimi Arikunto, (2002). Prosedur penelitian suatu praktek, Jakarta: Rineka

Sukandarrumidi. (2010). Bencana alam & bencana antropogene, Yogyakarta:

Suryabrata, Sumadi. (1987). Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali.

Triatmodjo, B. (1999). Teknik Pantai, Beta Offset, Yogyakarta.

University Press

Wirawan Sarwono, Sarlito. (2015). Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali

Sumber-Sumber Lain

Undang-undang Republik Indonesia 18 No 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Undang-Undang Republik Indonesia 3 No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan Bupati Minahasa Selatan No 20 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah